

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Isu lingkungan dan manusia menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan menjadi konsensus global untuk penanganan kerusakan yang terjadi dari waktu ke waktu. Manusia mulai sadar kerusakan lingkungan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan, dari banyak fenomena alam yang biasanya tidak terjadi kini mulai terjadi dan merugikan banyak makhluk hidup. Pada Tahun 1985, penemuan pertama akan lubang ozon menjadi kekhawatiran besar masyarakat Amerika Serikat khususnya (CNN Indonesia, 2023), sehingga pada tahun 1988 banyak peneliti melakukan riset akan fenomena alam yang tidak pernah terjadi sebelumnya muncul.

Dimulai dari situasi tersebut pemerintah Amerika Serikat lebih berkonsentrasi dalam bentuk penanggulangan kerusakan lingkungan dengan menggunakan media dan jurnalisme. Pemerintah dan masyarakat juga harus ikut melakukan tindakan preventif menjaga kondisi lingkungan (Pujayanti, 2012). Di mana penekanan utama pada konteks ini adalah membangun komunikasi yang tepat agar masyarakat menyadari bahwa tantangan yang hadir saat ini adalah pada kerusakan lingkungan yang mengancam seluruh dunia bukanlah hal yang tabu.

Lingkungan yang dijadikan sebagai konsentrasi global melibatkan komunikasi antar pimpinan negara hampir di seluruh dunia untuk melakukan kerja sama kolektif yang dibangun antar negara untuk mencegah kerusakan lingkungan

berat, melalui badan internasional yang membawahi bidang pengelolaan lingkungan dengan bentuk perjanjian internasional sampai dengan program pengelolaan perubahan iklim (2012). Didukung dengan adanya komunikasi dan pertukaran informasi yang dimiliki untuk menjadi bekal program yang dibentuk di wilayah negara masing-masing memenuhi tujuan dari perjanjian internasional tersebut.

Upaya komunikasi yang dibangun antar pemerintah salah satunya dapat melalui komunikasi lingkungan yang dijadikan sebagai media pragmatis dan konstitutif (Cox, 2010). Di mana dalam fungsi pragmatis digunakan sebagai bentuk edukasi dan persuasi kepada masyarakat dan fungsi konstitutif digunakan sebagai pembentuk persepsi akan realitas dan juga sifat lingkungan. Dua fungsi ini selalu ditekankan pada tiap-tiap program yang dijalankan pemerintah terkhususnya yang tergabung dalam perjanjian internasional untuk menjadi dasar membentuk pandangan masyarakat akan pentingnya kesepahaman terhadap masalah lingkungan.

Isu Perubahan iklim sering sekali menjadi tajuk berita dan penelitian dalam dekade waktu terakhir walaupun masih banyak yang belum memahami fenomena ini dengan baik. Adanya perubahan iklim mencakup pemanasan global dan efek samping dari adanya fenomena iklim atau cuaca seperti curah hujan yang makin tinggi, cuaca yang semakin ekstrem serta adanya peningkatan kecepatan angin. Perubahan iklim diakui sebagai salah satu ancaman yang sangat serius pada manusia dan makhluk hidup lain karena dapat mengganggu ekosistem, keanekaragaman hayati serta kesehatan (Heshmati, 2020). Hal yang dapat

dirasakan manusia secara langsung dengan adanya perubahan iklim ini adalah kerawanan air dan juga pangan, adanya peningkatan terhadap angka kematian, serta adanya transmigrasi atau perpindahan penduduk.

Adanya persepsi akan risiko dari perubahan iklim atau *climate change* dikonsepsikan sebagai sebuah proses membedakan dan menafsirkan sinyal dari berbagai sumber yang ada akan perubahan iklim serta membangun penilaian subjektif akan adanya kemungkinan dan tingkat kerusakan akan bahaya yang ditimbulkan saat ini maupun masa mendatang. Para peneliti mengungkapkan faktor-faktor banyak masyarakat yang belum menyentuh pada isu perubahan iklim karena belum merasakan atau sangat minim wawasannya akan adanya isu ini (Malihah, 2022), sehingga kepekaan akan terjadinya perubahan iklim masih belum terasa karena memang dampak yang dirasakan bersifat jangka Panjang atau perlahan-lahan tidak langsung terjadi (Wang, Geng, & Rodríguez-Callaz, 2021). Diperlukannya bimbingan ekstra kepada masyarakat untuk bekerja sama secara kolektif, untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih parah dan dapat membahayakan keberlangsungan hidup.

Fenomena lingkungan yang terjadi di Indonesia akan terjadinya penyimpangan iklim sangatlah sering terjadi. Salah satu yang menjadi konsentrasi penting ketika musim kemarau dan musim hujan terjadi tidak sesuai dengan ketentuan waktunya (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2007). Salah satu contoh kongkret adalah banjir besar di wilayah DKI Jakarta namun di Jawa tengah mengalami kekeringan

Hal lain yang terjadi adalah degradasi ekologi yang melingkupi kehutanan, kelautan, sampah plastik sampai dengan polusi (udara, tanah dan air). Kebakaran

hutan yang terjadi atau deforestasi hutan pada tahun dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir dimulai dari tahun 2001 sampai dengan 2021 terjadi penurunan luas hutan nasional dengan perhitungan 9,95 hektar. Tidak hanya itu, adanya produksi sampah yang masif belum menemukan cara produktif akan pengelolaannya, berdasarkan data terdapat 39% sampah belum terkelola salah satunya mikro plastik yang menempati 66 juta ton per tahun namun hanya 10% yang dapat didaur ulang (Kompas.id, 2023).

Dengan adanya kondisi seperti ini, pemerintah harus memahami bahwa proses penerimaan informasi lingkungan yang cukup kompleks sulit dipahami langsung oleh masyarakat. Perlu dilakukan pemberitaan, seruan akan fenomena yang terjadi serta efek yang ditimbulkan secara terus menerus. Hal tersebut guna untuk menstimulus masyarakat agar dapat lebih menaruh perhatian pada lingkungan dan melihat seberapa jauh respons publik terhadap penanganan masalah lingkungan (Westley, 1971). Komunikasi yang dapat mengubah perilaku masyarakat dapat dihantarkan melalui beberapa level komunikasi. Diawali dari pemahaman informasi secara individual, interaksi tatap muka secara langsung, melalui level komunitas, organisasi, komunikasi dengan pendekatan menggunakan bahasa daerah ataupun komunitas sampai kepada level negara. Komunikasi dengan level tersebut diiringi dengan penjelasan akan 'sebab dan akibat' dari pesan yang disampaikan.

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan COP (*The Conference of Parties*) *United Nation Framework Climate Change Conference* setiap tahunnya yang sudah berjalan langsung selama 28 kali ini untuk penanganan perubahan iklim yang terjadi. Dengan Indonesia yang memiliki hutan tropis ke tiga di dunia sehingga menjadi salah satu aktor dalam pengendalian iklim dan menjadi salah satu aktor

dalam UNFCCC (PPID KLHK, 2021). Salah satu program yang dibuat dalam rangka memenuhi perannya dalam konferensi ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI membuat terobosan yang dinamakan Program Kampung Iklim atau ProKlim sebagai salah satu bentuk dari *sustainable Development*.

ProKlim dibentuk sebagai salah satu pembangunan kota yang berkelanjutan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar ikut turun tangan langsung berperan dalam pengendalian perubahan iklim melalui komunitas yang berorientasi di kota besar sampai dengan desa terpencil (Faedlulloh, Irawan, & Prasetyanti, 2019). Hal ini dianggap menjadi salah satu langkah besar, membentuk satu sistem yang diperuntukkan untuk lingkungan berdasarkan masyarakat berbasis wilayah paling dekat dengan masyarakat, yaitu RW. Hal ini diterapkan untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan adanya lingkungan kumuh, banjir, kualitas udara yang buruk karena polusi, sampah, hingga *possibility* adanya penurunan kesehatan masyarakat dari kondisi lingkungan yang tidak sehat.

Komitmen yang dijalankan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dituangkan dalam aksi pengendalian perubahan iklim salah satunya dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Mencoba untuk menembus target yang dimiliki pemerintah pada tahun 2030 pada *Target Nationally Determined Contribution* (Government of Indonesia & GGGI, 2021). Dijelaskan bahwa hal tersebut dapat menurunkan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) mencapai 29 persen dengan adanya dukungan internasional 41 persen sebagai upaya mencegah kenaikan suhu permukaan bumi. Dari target tersebut peran KLHK melakukan sinergisitas antara sektor terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, Kementerian

Perindustrian, Kementerian PUPR sebagai tanggung jawab bersama dalam memenuhi target yang ada. Salah satu yang sudah dijalankan dalam skala yang besar adalah skenario LCCP (Low Carbon Compatible with Paris Agreement) di tahun 2060 dan FOLU (Forest and Land Use) Net Sink 2030.

Strategi untuk menjalani target ini juga perlu peran dari masyarakat agar dapat mencapai hasil maksimal, salah satunya dengan kegiatan antropogenik (Trihusodo, 2023). Salah satu yang ditekankan dalam menjalankan program ini adalah mencegah adanya kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu, adanya optimisme dalam pengendalian Gas Rumah Kaca, menekan deforestasi, dan emisi karbon dari dibentuknya program ini.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh negara dalam menjalin hubungan kerja sama, salah satunya adalah pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa yang dilakukan secara *video conference* tahun 2020 dalam pelaksanaan WGECC (*The Third Working Group on Environment and Climate Change*) di mana Indonesia juga menjadi Tuan rumah, membahas komitmen Indonesia dan Uni Eropa dalam kerja sama melindungi lingkungan dan memitigasi perubahan iklim yang menjadi bagian dari perjanjian pada agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2030, Perjanjian Paris dan konferensi lingkungan multilateral lainnya (PPID KLHK, 2021). Penanganan yang disepakati terkait ekonomi sirkular, pengelolaan keanekaragaman hayati sampai dengan penggunaan energi terbarukan. Dalam perspektif komunikasi lingkungan hal ini dilihat banyak aspek termasuk perihal ekonomi, di mana isu lingkungan dan ekonomi pun menjadi faktor penting dalam kepentingan nasional sebuah negara.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup periode 2019-2024 Siti Nurbaya Bakar menjalin kerja sama bilateral perubahan iklim Bersama dengan Amerika Serikat pada tahun 2022 untuk menahan kenaikan suhu global. Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Indonesia-Amerika untuk melakukan *transfer knowledge* berupa penanganan iklim dengan berbagai program yang dirancang dari kedua negara untuk dapat mengadaptasi berbagai aksi iklim yang dilakukan secara sistematis berdasarkan konvensi internasional (Biro Hubungan Masyarakat KLHK, 2022). Namun yang menjadi permasalahan adalah komunikasi yang dibangun dalam program *transfer knowledge* ini dilakukan dengan konsep segitiga terbalik. Pemahaman yang didapat hanya ada pada kalangan petinggi pemerintahan dan sangat minim informasinya yang sampai kepada masyarakat, sehingga permasalahan akan pesan yang ingin dikembangkan tidak sampai kepada publik.

## **1.2 Identifikasi Masalah atau Fokus Penelitian**

Program Kampung Iklim (ProKlim) dibentuk pemerintah untuk pengendalian perubahan iklim. Namun, informasi yang tersampaikan dan partisipasi masyarakat masih sangat rendah terutama pada kota-kota besar seperti di DKI Jakarta. Kebijakan terkait ProKlim dapat didukung dengan adanya teknik komunikasi yang tepat, untuk menghindari kegagalan dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat dengan adanya isu baru yang perlu dijadikan kekhawatiran baru pada masyarakat (Nasor, 2013).

Peran manusia dalam penanganan perubahan iklim menjadi sangat krusial untuk penentuan kebijakan, tindakan serta hasil konservasi yang tepat. Hal ini berkaitan dengan lingkungan politik serta peran media. Berkaitan dengan kebijakan mengenai mitigasi dan adaptasi yang diperuntukkan untuk lingkungan atas dasar kesepakatan politik yang dibangun oleh pemerintah, pendapat ahli, organisasi penggerak lingkungan, pebisnis serta Gerakan kontra sampai kepada masyarakat (Peeples, 2005). Dengan adanya komunikasi Lingkungan menjadi ranah penyampaian pesan yang spesifik demi tujuan menjaga lingkungan terhadap pengelolaan yang tepat.

Ada beberapa tujuan yang menjadi dasar dalam hubungan manusia dan lingkungan, menurut Castree et al. (2014) menyatakan bahwa ilmu sosial lingkungan bertujuan untuk mendalami secara sistematis adanya aturan, preferensi, anggapan, hubungan dan institusi yang merumuskan bagaimana manusia dapat memperlakukan dan menjaga dalam menggunakan dunia non-manusia. Selain itu bertujuan untuk mengubah dan mengevaluasi bentuk perilaku manusia untuk melindungi lingkungan non-manusia dalam kata lain lingkungan.

Pengelolaan lingkungan harus dijalankan dengan adanya komunikasi yang tepat untuk disampaikan kepada khalayak publik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya sosialisasi terhadap masyarakat agar meningkatnya kesadaran dalam penjagaan lingkungan khususnya didorong dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku. Kebijakan melahirkan sebuah produk-produk politik yang khususnya diperuntukkan dalam penjagaan lingkungan berkelanjutan. Khususnya pada pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap pengendalian iklim.

Dalam penelitian ini tertuju kepada Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan dan segenap dinas yang bekerja membentuk strategi dan juga upaya pengenalan ProKlim. Dengan adanya program yang pro lingkungan yang dijalankan harus ada sinergitas yang terbangun dengan masyarakat untuk melaksanakan tujuan utama dari program kampung iklim yang dijadikan sebagai Program nasional KLHK khususnya di wilayah-wilayah yang rawan bencana.

*Sixt Assessment Report AR6 IPCC* mendefinisikan bahwa wilayah Jawa dan Sumatera memiliki kerentanan tinggi merespons kondisi perubahan iklim dengan adanya perubahan suhu dan curah hujan. Pulau Jawa yang menjadi titik utama penelitian ini khususnya provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia menjadi wilayah yang paling disoroti terkait pengelolaan polusi udara yang diproduksi sampai dengan kualitas udara yang ada di tengah masyarakat menjadi sumber masalah utama saat ini.

Dilansir dari *website IQ Air* mengenai kondisi polusi di DKI Jakarta secara langsung menunjukkan bahwa kualitas udara hampir di seluruh wilayah jakarta berkualitas tidak sehat sampai dengan sangat tidak sehat. Terkhususnya bagi kalangan sensitif, seperti lansia, anak-anak, orang dengan kebutuhan tertentu (IQ Air, 2023). Hal ini memicu penulis untuk mempelajari lebih dalam adanya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah untuk memberikan informasi penting kepada masyarakat khususnya Warga DKI Jakarta memecahkan solusi penanganan polusi dengan program yang telah dibuat salah satunya Program Kampung Iklim dalam pengembangan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi kajian terdahulu seputar komunikasi partisipatif yang mengkaji terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dari ketiga penelitian sebelumnya (Fitryarini, 2018), (Maina, Biwott, & Ombaka, 2020), (Widhagdha, Purwanto, & Hidayat, 2019) melakukan kajian komunikasi partisipatif melalui organisasi di luar dari pendekatan institusional belum memberikan dampak yang signifikan, dan menjadikan komunikasi partisipatif yang dibangun tidak berada dalam tahap pemberdayaan. Ketiga penelitian ini fokus komunikasi partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan, melihat pada tingkat partisipasi masyarakat dan juga *impact* atau pengaruh kepada masyarakat dengan adanya pendekatan ini, dalam menyukseskan sebuah program.

Hal ini diperkuat dengan pendapat Purwanto (2001) jika dalam suatu program berhubungan dengan masyarakat atau publik meliputi hubungan edukatif yang menjembatani antara penyampai pesan dan penerima pesan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga tidak ada keraguan, hubungan kultural yang dijadikan sebagai pendekatan dan mengetahui kebiasaan dan kebutuhan yang diinginkan serta hubungan institusional di mana adanya Kerja sama yang dilakukan beberapa pihak untuk berkolaborasi sehingga dalam pembangunan berkelanjutan ini bisa mendapati tujuan.

Hal ini diperkuat dengan pandangan Thomas yang Kembali dikaji oleh Nair & White (1994) terdapat tiga area yang digunakan dalam komunikasi partisipatif yaitu epistemologi, organisasi dan politik. Hal ini menjelaskan bahwa adanya persamaan kekuasaan dalam komunikasi transaksional (*receiver* dan *sender*),

didengar dan mendengar menjadi kunci penting dan dari area politik dinyatakan bahwa adanya kekuatan atau *power* dalam penentuan kebijakan menjadi salah satu landasan penting untuk menjadikan sebuah program menjadi sukses dan berkelanjutan, dengan begitu peneliti akan menawarkan kajian dengan pendekatan melalui institusi kolaboratif karena menilai hal ini akan lebih strategis jika bersentuhan langsung dengan pemangku kebijakan.

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa ada komunikasi partisipatif semu, tentu hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi partisipatif, dikarenakan adanya sifat komunikatif yang dalam sebuah gambaran besar dari komunikasi partisipatif yang membangun kepercayaan, adanya pertukaran pengetahuan sampai dengan titik upaya penyelesaian masalah, jika tidak ada prinsip penyelesaian masalah maka hal tersebut dan masih diambil dalam keputusan sepihak, maka belum bisa dikatakan komunikasi partisipatif.

Hal ini diperkuat dengan model yang dibangun oleh Habermas (2008) di mana dalam proses partisipatif itu sendiri bisa gagal jika desain dan implementasinya buruk, jika dalam prosesnya belum melakukan Tindakan komunikatif, tidak tulus serta para administrator sebenarnya belum bisa memberikan kesempatan untuk mendengarkan kepentingan dari publik ataupun penerima informasi. Sehingga hal tersebut belum bisa dikatakan komunikasi partisipatif jika hanya memenuhi prinsip dialog dalam penerapannya. Sehingga perlu di evaluasi kembali penggunaan subjek komunikasi partisipatif yang memang terdefiniskan secara utuh dan mengembangkan konsep dari penelitian sebelumnya.

Selain itu peneliti juga melihat dalam kajian terdahulu banyak menjelaskan komunikasi partisipatif banyak bersentuhan dengan pendekatan media, namun peneliti melihat sifat media yang berkembang pesat dalam pola komunikasinya dengan *platform* yang berbeda sampai dengan karakter masyarakat yang dinamis memperkuat kajian ini untuk melihat kebaruan dalam komunikasi partisipatif dalam media akan lebih optimal jika dilaraskan dengan *current situation*.

Didukung dengan pandangan yang dinyatakan oleh McLuhan (1962) dalam teori *Determinisim Technological* bahwa Perubahan penggunaan medium atau media dari waktu ke waktu memberikan pengaruh kepada manusia sehingga kebaruan tren atau pola yang hadir dalam membangun komunikasi partisipatif. Hal ini mendukung bahwa penggunaan media dari waktu ke waktu tetap menjadi peranan penting dalam penyebaran informasi. Pada medium pun menjadi hal yang perlu dikaji terus menerus dan melihat perkembangannya.

Pada evaluasi kajian terdahulu peneliti mengaitkan dengan objek penelitian terkait program pembangunan berkelanjutan sebagai program nasional dalam pengendalian iklim yaitu Program Kampung Iklim (ProKlim) yang bertempat di daerah DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan dengan menelusuri penggunaan media sebagai medium komunikasi partisipatif yang relevan pada waktu penelitian.

Penulis menginginkan adanya penelitian di masa mendatang dalam komunikasi partisipatif pada konteks pembangunan berkelanjutan dapat dikaji lebih dalam agar dapat dilihat perbedaan dari tiap-tiap penelitian bisa memberikan suatu ajakan dan kesadaran bagi masyarakat dan juga kemajuan dalam keilmuan komunikasi dalam mempengaruhi masyarakat untuk meningkatkan *awareness*

terhadap lingkungan melalui cara komunikasi partisipatif. Terlebih pada isu lingkungan yang harus menjadi konsentrasi besar sebuah bangsa untuk bisa membangun pembangunan keberlanjutan yang dimulai dari komunikasi yang dibangun sebagai awal mula pendekatannya. Dapat disimpulkan bahwa dimasa mendatang komunikasi tidak hanya dilakukan sebagai alat penggerak namun juga menjadi suatu proses penentu hasil berhasilnya atau tidak berhasilnya sebuah informasi dapat disalurkan dan dapat dimaknai dengan baik, sehingga tujuan dalam program tersebut berhasil.

Program Kampung Iklim yang digagas KLHK dalam penanganan perubahan iklim serentak dijalankan dalam cangkup nasional. Kondisi DKI Jakarta sebagai salah satu sentral kegiatan masyarakat menjadi perhatian khusus terhadap kondisi lingkungan saat ini makin memburuk. Meningkatkan harapan hidup masyarakat menjadi penting dan prioritas pemerintah saat ini. Kenyataannya dalam prosesnya membutuhkan komunikasi yang baik dalam sosialisasi sampai dengan penerapan rancangan ProKlim sehingga tujuan yang ditargetkan. Seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan pada 2060 Indonesia menjadi negara yang Netral Karbon, dan menuju ramah lingkungan serta dapat menjalankan pemberdayaan masyarakat dengan baik dan memperkenalkan pembangunan berkelanjutan sebagai gaya hidup bagi masyarakat dimulai dari hal kecil yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari.

Dari tujuan ini penulis akan mengkaji proses penyampaian informasi melalui komunikasi partisipatif untuk mengkaji bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta Selatan dengan topik penelitian.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Jakarta Selatan membangun penerapan komunikasi partisipatif dalam program ProKlim?
2. Bagaimana respons masyarakat Jakarta Selatan menanggapi upaya komunikasi partisipatif pemerintah pada ProKlim?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan masalah dalam penelitian, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran mengenai strategi komunikasi partisipatif yang dilakukan pemerintah di wilayah kota administratif Jakarta Selatan pada pelaksanaan Program Kampung Iklim pada masyarakat di wilayahnya.
2. Melihat tingkat partisipasi dan respons yang terjadi pada masyarakat terhadap Program Kampung iklim di Jakarta Selatan

### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Adanya manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bagian kontribusi pada perkembangan penelitian komunikasi partisipatif dan komunikasi lingkungan. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi penelitian komunikasi partisipatif dan lingkungan terkait strategi pemerintah dalam koordinasi antar

Lembaga dan masyarakat. Selain itu, dengan perkembangan komunikasi lingkungan semoga bisa menjadi pilihan yang menarik bagi para peneliti untuk mengkaji Kembali penelitian seputar strategi komunikasi lingkungan dan komunikasi partisipatif.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu pengembangan yang akan berjalan demi tujuan waktu yang lama, maka dari itu dibutuhkan pola komunikasi yang tepat untuk melakukan pendekatan kepada khalayak banyak. Salah satu upayanya adalah menggunakan komunikasi partisipatif dan komunikasi lingkungan yang bisa memperkenalkan ProKlim sebagai salah satu contoh kasus yang dikaji peneliti. Hal ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerintah atas hasil kajian yang dilakukan peneliti dan bisa langsung di implementasikan pada ProKlim. Terutama pada pihak-pihak yang bekerja menjalankan ProKlim di Jakarta Selatan. Diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan atau bahan penelitian seputar strategi komunikasi partisipatif dalam konteks lingkungan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan penelitian ini, seperti pembuat kebijakan, profesional, tokoh masyarakat, maupun praktisi lingkungan.